

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, Andarusni dan Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 2. Hal.148.
- Budiarti, Melda. (2016). Kesiapan Dan Strategi Pemerintah Desa Dalam Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Penelitian di Desa Sumur Tujuh Kec. Wonosobo Kab.Tanggamus).
- Darajat, Anwar Hakim dan Septa Ekasari. (2021). Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar). Vol. 10, No. 1, *JURNAL TRANSLITERA*, Hal. 8-14.
- Deddy Lukman Shaid dan Muhammad Fahim Ilmi, "Penduduk Miskin Di DKI Jakarta Tahun 2020". <https://statistik.jakarta.go.id/penduduk-miskin-di-dki-jakarta-tahun-2020/> (diakses pada 2 April 2023, pukul 16.20).
- Fitriani, Rima. Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Dalam penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Menuju Sejahtera. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Inpres No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran
Jakarta Bps. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta,
<https://jakarta.bps.go.id/indicator/23/645/1/garis-kemiskinan-jumlah->

dan-persentase-penduduk-miskin-di-daerah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-2017-dan-2018.html. (diakses pada 3 April 2023, pukul 12.51).

Kementerian Sosial RI. 2020. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Tahun

2020.<https://www.kemensos.go.id/modules.php?name=News&act=detail&id=11510>. (diakses pada 3 April 2023, pukul 12.51).

Lestari, Ilmay Triyodani dan Niniek Imaningsih. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. *Jurnal Manajemen*, Vol.14 No.4, Hal. 739-746.

Miles, Mathew B et al. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press).

Nainggolan, Lora Eka et al. 2021. *Ekonomi Makro*, (Medan: Yayasan Kita Menulis), Hal. 8.

Norsanti dan Muhammad Afdalli. (2020). Aspek-Aspek Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pada Desa Binturu dan Desa Masintan), Vol. 2, No. 1, Al Iidara Balad, Hal. 1-12.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Priyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.

Rahayu, Sri Lestari. (2012). *Bantuan Sosial DI Indonesia Sekarang Dan Ke Depan*. Bandung: FokusMedia.

Satibi, Iwan dan Undang Sudrajat. (2019). *Strategi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Tasikmalaya*, JISPO, Vol. 9, No. 2, Hal. 362-381.

Suyanto, Bagong. (2018). *Kemiskinan, Konflik, dan Ekses Pembangunan*. (Yogyakarta: Suluh Media).

Tegor et al. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Klaten: Penerbit Lakeisha.

Thalib, Tety.(2020). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo*, : Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik, Vol. VII, No. 1, Hal.39-48.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. (Jakarta: Penerbit Erlangga).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan.

Wahyuni , Ajeng. (2020), *Manajemen Kasus Pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Wilayah Jakarta Timur*.

Walfajrin. 2018. *Pengaruh Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin DI Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Yam, Jim Hoy. (2020). *Manajemen Strategi Konsep dan Implementasi*. Makassar: CV.Nas Media Pustaka.

Yulistiyono, Agus et al.(2021). *Bonus Demografi Sebagai Peluang Indonesia Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*, (Cirebo: Penerbit Insania), Hal. 55.



LAMPIRAN

A. Surat Penelitian



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manilla No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Jakarta, 6 Juni 2023

Nomor : 561/WD/VI/2023
Lamp :
Perihal : **Permohonan Penelitian dan Informasi Data**

Kepada Yth : Bapak/Ibu Pimpinan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Jl. Gunung Sahari II No. 6, Gunung Sahari selatan, Kemayoran
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa berikut ini:

Nama : Aricko Rama Kusuma
Nomor Induk Mahasiswa : 193515516148
Prodi / Konsentrasi : Administrasi Publik
Alamat Rumah : Jalan Binawarga Rt. 05 Rw. 07 No.91, Kel.Srengseng Sawah,
Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
No. Telepon : 087884501956
Email : arickokusuma@gmail.com

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : **"Analisis Strategi Dalam Menjalankan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan"**. Dengan Dosen pembimbing/penanggung jawab penelitian: Dr. Ahmad Muksin, M.Si. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Wakil Dekan


Dr. Bhakti Nur Avianto, S.IP., M.Si.


Anita Muwathi
Korwil DKI Jakarta

Program Studi : Ilmu Politik - Hubungan Internasional - Sosiologi - Administrasi Publik- Ilmu Komunikasi

Lampiran 1. 1 Surat Izin Penelitian Kepada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Jakarta, 27 Juli 2023

Nomor : 401/135/SK_KORKOT_JAKSEL/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Jawaban Permohonan izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas ilmu sosial
Dan Ilmu Politik
Universitas Nasional

di
Jakarta

Terkait surat saudara Nomor 561/WD/VI/203 tanggal 06 Juni 2023 hal Permohonan Ijin Penelitian, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Kami mempersilahkan mahasiswa saudara melakukan Penelitian dengan judul analisis strategi Dalam Menjalankan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan yang dilaksanakan pada bulan Juli 2023 atas nama Aricko Rama Kusuma dengan Nomor Mahasiswa 193515516148, Prodi Administrasi Publik.
2. Setelah melaksanakan Penelitian agar yang bersangkutan memberikan laporan hasil kegiatan kepada Lembaga PPKH Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Koordinator Kota
PPKH Kota Adm. Jakarta Selatan



MAMAT SUMARNA
KP004125

Tembusan Kepada Yth:

1. PPKH Propinsi DKI Jakarta
2. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Arsip

**Lampiran 1. 2 Surat Balasan Untuk Penelitian Tentang Program
Keluarga Harapan**

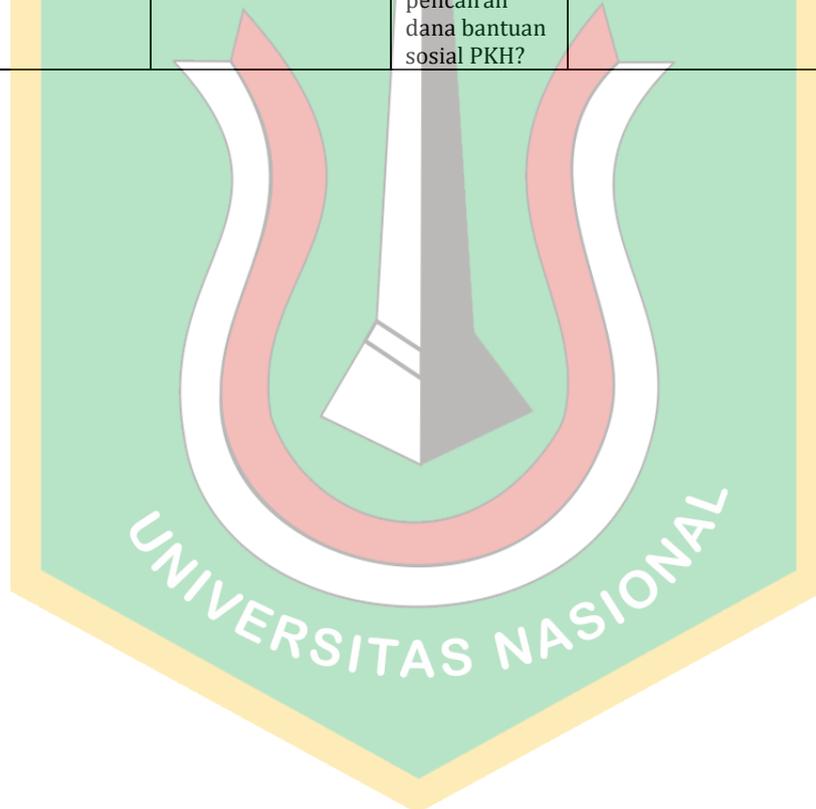
B. Lampiran 2. 1 Daftar Pedoman Wawancara

No	Narasumber	INDIKATOR			
		Corporate Strategy (Strategi Organisasi)	Program Strategy (Strategi Program)	Resource Support Strategy (Strategi Sumber Daya)	Institusional Strategy (Strategi Kelembagaan)
1.	Koordinator Wilayah DKI Jakarta	<p>Sebagai Pelaksana Program Keluarga Harapan Wilayah (koordinator wilayah) apa wewenang yang Bapak miliki? Dan bagaimana Bapak menggunakan wewenang tersebut?</p> <p>Apa tugas Bapak Sebagai Pelaksana Program Keluarga Harapan Wilayah?</p> <p>Apa tanggung jawab Bapak Sebagai Pelaksana Program Keluarga Harapan Wilayah?</p> <p>Sebagai Pelaksana Program Keluarga Harapan Wilayah bagaimana Bapak melakukan koordinasi dalam menjalankan PKH?</p> <p>Bagaimana Anda akan berkomunikasi dengan masyarakat tentang Program Keluarga Harapan dan bagaimana mengatasi potensi disinformasi atau kurangnya pemahaman tentang program tersebut?</p>	<p>Apa rancangan kegiatan Bapak terkait penyaluran bantuan PKH kepada masyarakat?</p> <p>Bagaimana mekanisme menurut Bapak terkait penyaluran bantuan PKH?</p> <p>Bagaimana Anda berencana untuk memonitor dan mengevaluasi dampak jangka panjang dari Program Keluarga Harapan terhadap masyarakat?</p> <p>Apa langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai departemen dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan?</p>	<p>Bagaimana pengelolaan dan pengalokasian anggaran dalam menjalankan Program Keluarga Harapan?</p> <p>Bagaimana Anda akan memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan digunakan secara efisien dan transparan?</p> <p>Bagaimana pengelolaan dan pengalokasian Sumber Daya Manusia dalam menjalankan Program Keluarga Harapan?</p> <p>Bagaimana pengelolaan dan pengalokasian Infrastruktur dalam menjalankan Program Keluarga Harapan?</p>	<p>Apakah Anda memiliki rencana untuk berkolaborasi dengan sektor swasta atau organisasi masyarakat sipil dalam mengoptimalkan manfaat dari Program Keluarga Harapan?</p> <p>Bagaimana pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam implementasi PKH? (Strategi Kelembagaan) Apa kemudahan yang disediakan dengan adanya kerja sama dengan mitra lain?</p>

2.	Koordinator Kota Jakarta Selatan	<p>Bagaimana Fungsi, tugas, tanggung jawab dan Wewenang Koordinator Kota Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh koordinator kota?</p>	<p>Apa rancangan kegiatan Bapak terkait penyaluran bantuan PKH kepada masyarakat?</p> <p>Bagaimana mekanisme menurut Bapak terkait penyaluran bantuan PKH?</p>	<p>Bagaimana pengelolaan dan pengalokasian anggaran dalam menjalankan Program Keluarga Harapan?</p> <p>Bagaimana pengelolaan dan pengalokasian Sumber Daya Manusia dalam menjalankan Program Keluarga Harapan?</p> <p>Apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, menyangkut sosialisasi program, apa tindakan yang dilakukan?</p> <p>Bagaimana pengelolaan dan pengalokasian Infrastruktur dalam menjalankan Program Keluarga Harapan?</p>	<p>Apakah terdapat kerja sama dengan lembaga, organisasi, ataupun kelompok dalam menjalankan PKH untuk mencapai tujuan?</p> <p>Apakah kemudahan yang disediakan dengan adanya kerja sama dengan mitra lain?</p>
3.	Koordinator Kecamatan Jagakarsa	<p>Sebagai Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan (Koordinator Kecamatan) apa wewenang yang bapak miliki? Dan bagaimana bapak menggunakan wewenang tersebut?</p> <p>Apa tugas Bapak sebagai Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan (Koordinator Kecamatan)?</p> <p>Apa tanggung jawab Bapak sebagai Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan (Koordinator Kecamatan)?</p> <p>Koordinasi apa yang bapak lakukan dalam menjalankan PKH sebagai korcama?</p>	<p>Apakah rancangan kegiatan bapak terkait penyaluran bantuan PKH kepada masyarakat?</p> <p>Bagaimana mekanisme menurut Bapak terkait penyaluran bantuan PKH?</p> <p>Bagaimana rancangan tindakan dalam melakukan pemeriksaan data peserta yang dimiliki?</p>	<p>Bagaimana pengelolaan dan pengalokasian anggaran dalam menjalankan Program Keluarga Harapan?</p> <p>Bagaimana Pengelolaan dan pengalokasian Sumber Daya Manusia dalam menjalankan Program Keluarga Harapan?</p> <p>Bagaimana Pengelolaan dan pengalokasian Infrastruktur dalam menjalankan Program Keluarga Harapan?</p>	<p>Apakah terdapat kerja sama dengan lembaga, organisasi, ataupun kelompok dalam menjalankan PKH untuk mencapai tujuan? Adakah kemudahan lain yang disediakan bekerja sama dengan mitra?</p>
4.	Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan Jagakarsa	<p>Sebagai Kasatpel Sosial Kecamatan Jagakarsa Apa wewenang yang ibu miliki di dalam Program Keluarga Harapan?</p>	<p>Menurut Ibu, Apakah Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jagakarsa</p>	<p>Menurut Ibu, Apakah ada anggaran dalam menjalankan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jagakarsa?</p>	<p>Menurut Ibu, Apakah ada kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah (Kecamatan) dengan SDM</p>

		<p>Apa tugas ibu dalam Program Keluarga Harapan? Apa tanggung jawab Ibu dalam Program Keluarga Harapan?</p> <p>Menurut Ibu, Bagaimana koordinasi yang dilakukan dalam Program Keluarga Harapan? Apakah sudah berjalan baik?</p>	<p>sudah tepat sasaran?</p> <p>Menurut Ibu, Apakah Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jagakarsa sudah sampai hasil yang diinginkan?</p> <p>Apakah ada target dari Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jagakarsa</p>	<p>Menurut Ibu, Apakah bantuan yang di terima KPM dikelola sesuai kewajibannya?</p> <p>Menurut Ibu, Bagaimana Sumber Daya Manusia (Pendamping) dalam menjalankan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jagakarsa?</p> <p>Menurut Ibu, Apakah Program Keluarga Harapan di kecamatan Jagakarsa memiliki fasilitas untuk menunjang pelaksanaan/penyelenggarannya?</p>	<p>PKH untuk mencapai tujuan Program Keluarga Harapan?</p>
5.	Pendamping Kecamatan Jagakarsa	<p>Bagaimana Bapak/Ibu menyusun rencana kerja PKH di wilayah kecamatan Jagakarsa?</p> <p>Bagaimana koordinasi yang dilakukan pendamping terkait sosialisai kebijakan dan bisnis PKH kepada aparat pemerintah, KPM PKH, dan masyarakat umum?</p>	<p>Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Program Keluarga Harapan? Salah satu nya dengan P2K2 ya?</p> <p>Bagaimana rencana tindakan yang di gunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari Program Keluarga Harapan?</p> <p>Apakah di kecamatan Jagakarsa ada KPM yang mengalami kesulitan untuk melakukan pencairan dana?Jika ada, apa solusinya?</p>	<p>Apakah alokasi anggaran PKH sudah tepat sasaran? Dan Apakah KPM PKH di kecamatan Jagakarsa sudah benar-benar menerimanya dan sesuai komponennya?</p> <p>Apakah ada anggaran dalam menjalankan PKH di kecamatan Jagakarsa?</p> <p>Apakah penggunaan alokasi anggaran PKH oleh KPM sudah sesuai aturan?</p> <p>Apakah para pendamping melakukan edukasi dan sosialisasi terkait bantuan yang diterima?</p> <p>Untuk pelatihan atau peningkatan SDM PKH di Kecamatan Jagakarsa bagaimana?</p>	<p>Apakah di Kecamatan Jagakarsa ada KPM yang bekerja sama dengan Pemerintah ataupun Non-Pemerintah? Ada KPM yang dimudahkan dengan adanya kerja sama di bidang pendidikan?</p>

			Apakah ada kendala terkait penyaluran bantuan PKH? (dari bank/PT. Pos)		
6.	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Jagakarsa	Bagaimana informasi yang disampaikan pendamping terkait informasi/kebijakan baru? Apakah mudah dimengerti? Jika Ibu mengalami kendala, apa yang ibu lakukan?	Apakah ibu pernah melihat ada nya KPM yang sudah mapan? Apakah Ibu mengalami kesulitan untuk melakukan pencairan dana bantuan sosial PKH?	Apakah Ibu menggunakan dana bantuan sosia PKHl sesuai aturan? Apakah Ibu mendapat dana bantuan sosial, sesuai komponennya? Apakah para pendamping melakukan edukasi dan sosialisasi terkait bantuan yang diterima?	Apakah Ibu mendapatkan kemudahan untuk mengakses pendidikan?



C. Lampiran 3. 1 Transkrip Wawancara I

Informan Penelitian	Koordinator Kota Jakarta Selatan Pak Mamay Sumarna
Hari/Tanggal	Senin, 03 Juli 2023

A: Peneliti

B: Informan

A: Bagaimana Fungsi, tugas, tanggung jawab dan Wewenang Koordinator Kota?

B: 1. Koordinir, pertama memetakan kekuatan yang ada, karena hari ini PKH pendamping itu berdasarkan KTP karena Pendamping punya akses berkaitan dengan SIKS (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial). Karena guna mapping/memetakan bisa jadi ada satu wilayah yang kosong, contoh di satu Kecamatan tidak ada pendamping karena ktp nya beda Kecamatan, koordinator kota dapat berkoordinasi dengan suku dinas untuk mengusulkan kepusat untuk mengisi daerah-daerah yang kosong tersebut.

Contoh setia budi, mengalami kekosongan pendamping yang ktp setia budi, tidak mungkin kpm di Kec. Setia Budi tidak ada yang mengurus, sedangkan di pasar minggu ada 11 pendamping, setelah dipetakan oleh koordinator kota, koordinator kota dapat berkoordinasi dengan pusat meminta arahan dari pusat, pusat mengeluarkan SK, untuk penempatan pendamping di wilayah kosong tersebut.

2. Mengkoordinasikan segala hal -hal kebijakan kepada stake holder

Berkoordinasi dengan suku dinas, kepala dinas, kepala seksi, kecamatan-kecamatan dan kelurahan-kelurahan artinya seluruh kebijakan terbaru atau sumber informasi-informasi yang dibutuhkan oleh stake holder koordinator kota dapat memberikan. Dan

3. Mengontrol kinerja para pendamping

Sesuai SOP

Ada nya bentuk laporan

Jika ada aturan yang telah dilaksanakan, maka berjalan dengan baik

Jika ada aturan yang dilanggar maka koordinator kota lah yang pertama kali menegur / assesment dan berjenjang (ada pelanggaran yang ringan, menengah, dan serius)

Contoh pelanggaran serius : Penyalahgunaan wewenang, Ada eskalasi untuk SP1, SP2, dan SP3 (Di Keluarkan/ Tugas:

1. Mengkoordinasikan ke Stake holder/ Lembaga Penyalur (himbara/Pos) dengan segala permasalahannya. Contoh; KPM mengadu belum menerima kartu.
2. Memberikan informasi terbaru terkait PKH, menjadi narasumber di kelurahan atau kecamatan.
3. Tugas nya karkot Mengacu pada koordinasi

Wewenangnya untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis yang berkaitan nya dengan pendamping karena Sudin tidak dapat memecat pendamping yang terkena pelanggaran, karena yang mempunyai wewenang Kemensos, Koordinator kota merekomendasikan.

Korkot mendapat informasi terbaru dari Pusat -

Contoh; Perubahan nominal bantuan, sehingga menimbulkan pertanyaan di masyarakat/KPM, dengan adanya perubahan tersebut penerima KPM mengadu ke Kelurahan, Sehingga kelurahan harus tau jawabannya maka Strategi yang digunakan oleh karkot adalah melakukan pertemuan untuk menjelaskan perubahan nominal di kelurahan dan kelurahan mengundang RT/RW sehingga memudahkan informasi menyebar ke masyarakat/KPM

Contoh; Tiba-tiba ada warga yang tidak dapat bantuan lagi, "kami kemarin keliling road show keseluruhan kelurahan dan kecamatan, dalam rangka sosialisasi kebijakan dan tindak lanjut dari penanganan kemiskinan ekstrem, Hari ini, Pemerintah pusat berkerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah duiminta data yang benar-benar valid karena banyak aduan tentang bantuan yang tidak tepat sasaran, maka pemerintah pusat memberikan kewewenangan untuk pemerintah daerah untuk memberikan usulan, usulan-usulan tersebut masyarakat harus tau, Kriterianya/Indikatornya menurut kemensos; Warga harus masuk DTKS, Kebijakan baru pemerintah pusat : penerima bansos yang dana nya dari APBN jangan lagi menerima dari APBD (contoh ada warga miskin PKH dapat KJP dapat sementara tetangga engga dapet dua duanya, pemerintah daerah sudah mulai mengeluarkan pelan-pelan, dan ini harus di sampaikan, dan banyak yang menyalahkan pendamping mengeluarkan, pendamping tidak dapat mengeluarkan KPM, dari pusat langsung

tidak lagi menjadi pendamping).

1. membuat laporan berjenjang kepada koordinator wilayah atas semua permasalahan di jakarta selatan
2. tanggung jawab terhadap pelaksananya/pendamping

Jika bicara tentang bantuan nya, Korkot tidak menyentuh ranah itu, karena sudah masuk kedalam rekening KPM

3. memastikan bahwa KPM benar-benar menerima bantuan tersebut

Kalau sebelum 2019 tugas Korkot jelas

Memverifikasi

Memvalidasi

Memutakhirkan

"Kami dapat data 10ribu kami cek kebawah, adakah dia komponennya ada anak sekolahnya engga? Ada ibu hamilnya engga? Kalo ada eligible kalo tidak ada non eligible lalu data kirim ke pusat.

Pas covid kemarin 3 tahun berturut turut, langsung mendapatkan data dari pusat 12ribu tambahannya, tanpa kami tahu warga ini siapa, warga ini belum tau kalo dia dapat apa engga, dapat kartu apa engga, Pertama melakukan koordinasi dengan bank - Bank kami ada data bayar sekian kartunya ada engga, ada, korkot sampaikan pada ibu-ibu untuk mengambil kartunya.

Mana kala adanya kesalahan teknis, kartunya hilang, warga jakarta ada yang belum pernah ke atm, ada penyalahgunaan atm oleh keluarga

contoh; Pak kok uangnya gaada? Kami cek di atm uangnya tidak ada.

Korkot koordinasi dengan bank - bank memberitahu informasi tentang adanya uang, dan telah diambil pada waktu tertentu di POM Bensin

Korkot bertanya kepada KPM yang melapor, pada waktu tertentu kartu dipegang oleh siapa?

Kata ibu tersebut anaknya, maka anaknya yang menanggung uangnya.

Pendamping melakukan edukasi kepada KPM

Koordinator bertanggung jawabkan laporan yang masuk

Kasudin bertanya kepada korkot ada laporan bahwa pendamping mengutip uang, karena itu tanggung jawab korkot, korkot melakukan check and re-check, setelah mengumpulkan bukti-bukti, pendamping tidak mengutip uang, pendamping ini mendampingi minima, minimal 500 Strategi yang digunakan untuk memudahkan penangannya, pendamping membuat kelompok berdasarkan geografisnya (Sesuai RT), dan diangkatnya ketua-ketua kelompok untuk memudahkan koordinasi, karena setiap pertemuan ada yang namanya FDS/P2K2, adanya inisiatif dari ketua kelompok nya untuk patungan membeli gorengan, membeli aqua, entah 2ribu, 5ribu ataupun 10ribu, dan ketika meminta ini terdengar oleh orang awam/ belum paham disangka yang mengambil pendamping padahal ini upaya ketua kelompok untuk kegiatan FDS.

Saya pernah merekomendasikan untuk mengeluarkan SP3 kepada pendamping yang terindikasi memegang kartu KPM, karena kartu harus di tangan KPM

Korkot punya tugas untuk Memastikan semua berjalannya dengan lancar

Dan ada bentuk pelaporannya, bentuk pelaporannya kami mengadakan rekonsiliasi (penyamaan data). Adanya kesamaan data yang diberikan dari Kemensos dan Lembaga penyalur. Sehingga kendala seperti Kartu yang belum di ambil dari bank, penyalahgunaan bantuan dari keluarga.

Di tahap sekarang penyaluran tercampur oleh PT. Pos - yang menyalurkan, melaporkan PT.Pos.

Jadi Kami (Korkot) concern kepada P2K2nya.

Jika penyaluran PT. POS langsung tugaskan MOUI langsung kerumah rumah, di foto langsung

Kalo dengan bank kami melakukan rekonsiliasi.

PT Pos digunakan dari tahun 2022, ada sebagian PT.Pos ada sebagian Bank

A: Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh koordinator kota?

B: Organisasi satu rantai komando, di atas korkot ada korwil, setiap bulan ada rapat, setiap pekan ada rapat, ada evaluasi, ada perintah-perintah harian atau pekanan atau bulanan, kebijakan kebijakan

Setiap kebijakan yang disampaikan korwil - Koreg - dari Pusat ya korkot sampaikan, jadi dilaporan dashboard korkot harus laporan, ada 25 item kerjaan. Ada foto dan lokasi jadi valid

Koordinasi korkot mengikuti instruksi Korwil dan disampaikan lagi

Kebawahnya pun korkot memiliki evaluasi pekanan dan evaluasi bulanan, ada rapat bulanan, mengumpulkan semua pendamping dan mengundang SUDIN untuk melihat selaku mitra, membicarakan tentang kendala dan aduan di setiap wilayah, Jika ada hal-hal yang tidak dapat dipecahkan saat rapat bulanan Korkot, maka akan bersurat resmi ke pusat melalui Dinas, Melalui Provinsi ke Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.

Contoh kasus ada nya seorang tunanetra penerima PKH tidak keluar lagi bantuannya, dia mengadu ke sudin, ke dinas sosial provinsi, ke kemensos, tindak lanjut yang diambil kemensos adalah mengirim tim kelapangan, orang ini benar tunanetra, orang ini punya dua anak sesuai komponen PKH, ketika mendatangi ke kelurahannya, ternyata hasil muskel nya (musyawarah Kelurahan) dia memang dikeluarkan, dasarnya tidak ada nya kategori, karena memiliki tanah dan listrik yang besar sehingga dapat kepentan sendiri. Korkot menemani tim dari pusat yang datang (assesment).

Apakah pada setiap tahunnya ada perencanaan yang berbeda yang dibuat oleh Bapak dalam menjalankan PKH?

Tentu nya kalau bicara planning pelaksanaan satu komando, terpusat, kalo pelaksanaan PKH sudah jelas tupoksinya, yang beda tiap tahun adalah bagaimana karkot memformulasikan agar segala sesuatu berjalan efektif dan lancar, kalau tugas se indonesia memang sama, bagaimana memastikan semua berjalan, contoh di sekretariat, para pendamping kan bekerja dilapangan, tapi kalo tidak ada orang di sekretariat jik ada orang mengadu siapa yang menerima? Maka karkot memastikan ada yang stay di sekretariat.

Jika ada kasus laporan, langkah-langkah kerja yang diambil setiap tahunnya di evaluasi agar efektif dan benar.

Karena 1 pendamping 600 KPM kalau dia keliling selama 1 hari apakah 600 KPM dapat di pegang selama 1 bulan? Kan engga mungkin, maka itu maksud dari efektif

Prinsip nya sama teknisnya lebih ditingkatkan kembali

Pengawasan terhadap SDM lebih melekat agar semua berjalan efektif dan benar, bentuk pengawasannya, hak dan kewajiban KPM nya terpenuhi

A: Apa rancangan kegiatan Bapak terkait penyaluran bantuan PKH kepada masyarakat?

B: Yang pasti bahwa bantuan masuk ke rekening KPM, yang karkot lakukan tentunya pertama menyampaikan kepada KPM bahwa penyaluran bantuan akan turun 4 kali, januari april juli september, jika sudah masuk silahkan dilaporkan pada pendampingnya dan nominalnya juga untuk dilihat sudah sesuai dengan komponennya atau tidak, guna dilaporkan untuk memantau perkembangannya udah salur apa belum, jadi indikator itu PKH ada salur ada cair, salur ketika dana masuk rekening, tapi harus cair yang artinya uangnya diambil/ ditarik tunai oleh KPM. Dulu ada anjuran pemerintah untuk menabung sekarang gaboleh harus diambil semua, karena kalau ada bantuan gadiambil ambil nanti ditarik negara, tau tau ilang lagi, jika dari sekian waktu tertentu belum diambil karena indikatornya orangnya sudah meninggal, dia tidak butuh, tidak tepat sasaran, jadi Karkot menyampaikan, mengingatkan, mereka melaporkan untuk penyaluran. Agar berjalan efektif dan yang pasti kata kunci seluruh KPM tidak boleh ATM/KKS nya dipegang atau dikasih oleh orang lain sehingga memicu penyalahgunaan.

A: Bagaimana mekanisme menurut Bapak terkait penyaluran bantuan PKH?

B: Jika berbicara mekanisme karena ini sudah baku dan pemberian, sebenarnya pendamping hanya memastikan saja karena bantuan langsung dikirim kerekening setiap KPM, jadi yang bisa pendamping lakukan

1 mengingatkan agar KKS dipegang KPM

2 melaporkan jika ada bantuan yang belum masuk, karena bantuan masuk secara bertahap.

3. Mekanisme mengikuti perintah presiden untuk cashless, karena dulu tunai

Mekanisme sekarang melalui PT. Pos, menteri sosial ingin percepatan, karena jika lewat bank banyak warga yang tidak tahu, Skala Indonesia, kendala dalam mengambil uang ke atm, contoh di pandeglang harus sampai 3 jam untuk mencari atm, maka kemensos memerintahkan disalurkan lewat PT.Pos yang mendatangi, pendapat kerkot tentang penyaluran melalui PT. Pos. ada Plus ada Negatif, Plusnya sudah jelas KPM disamperin, Minus nya tunai melihat tukang bakso lewat langsung ingin jajan.

A: Bagaimana pengelolaan dan pengalokasian anggaran dalam menjalankan Program Keluarga Harapan?

B: SDM PKH menerima gaji, honor dari kemensos, SDM PKH direkrut oleh kemensos, dan bukan PNS, SDM PKH bisa dikatakan honorer, tenaga ahli, melalui rangkaian test beberapa kali, uang operasional dulu ada uang kesekretariatan untuk cetak print, beli kertas dan segala macam, tapi sekarang tidak ada, kemensos sudah tidak mengalokasikannya, di beberapa wilayah lain Pemda memberikan insentif berupa motor operasional ada yang honor tambahan bulanan, di DKI tidak ada. Dalam arahan dari kemensos wilayah diharapkan 1,5% penerima bantuan untuk membantu operasional pendamping (34.57). harus turun ke lapangan tanpa bantuan operasional. Uang operasional setiap pendamping mandiri.

Selama nama KPM ada di data bayar maka bantuan akan masuk rekening

A: Bagaimana pengelolaan dan pengalokasian Sumber Daya Manusia dalam menjalankan Program Keluarga Harapan?

B: Dari kemensos ada diklat dan bimteg, jadi SDM PKH di berikan pengembangan dan keilmuan-ilmuan, yang terbaru di bimteg mengenai stunting, jadi ketika turun lapangan, tupoksi pendamping bukan membagikan uang melainkan mendampingi KPM, Pendamping ini harus mengisi edukasi tentang materi-materi itu. jadi SDM harus dikembangkan, selain dari bimteg, ada diklat, dan pendamping ada sertifikasi, SDM PKH harus mengupdate sertifikasinya, pengelolaan melalui bimteg dan diklat, ada yang dari pusat dan ada yang dari provinsi. Pendamping orangnya – pendampingan kegiatannya.

A: Apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, menyangkut sosialisasi program, apa tindakan yang dilakukan?

B: Tentu nya kita (korkot) melakukan koordinasi, karena fakta dilapangan banyak yang terus dingatkan kembali tentang Program Keluarga Harapan, karena program bansos di DKI khususnya banyak, orang tidak dapat membedakannya, kendala sosialisasi tentunya, jika berbicara sosialisasi, itu kan masif, bisa terjun ke warga bisa ke stake holder, kalau tataran stake holder, kami harus bersosialisasi dengan pejabat terkait, jika ke wilayahan Wali Kota, Camat, Lurah, RT/RW. Kalo fungsional suku dinas, beda ada teritorial dengan fungsional, kalo teritorial dia punya masa, Wali kota – camat – lurah – RW – RT – Dasawisma. Jika ada kendala sosialisasi maka harus segera didorong oleh Korkot, untuk segera sampai informasinya, contoh kartu yang tidak sampai, adanya missskomunikasi, antara Pak RT dengan KPM, Pindah rumah tanpa melakukan pelaporan ke RT/RW setempat. Jika uang tidak diambil, uang akan aman di bank, karena uang hanya bisa dicairkan sesuai nama yang terdaftar. Karena banyak nya nama pendamping maka kemensos menyebutkan nya semua pendamping sosial, jika ada laporan dari pusat tidak hanya dalam PKH, SDM PKH harus turut serta sesuai arah pusat.

A: Bagaimana pengelolaan dan pengalokasian Infrastruktur dalam menjalankan Program Keluarga Harapan?

B: Kami setiap jenjang mendapat fasilitas berupa sekretariat, di setiap kecamatan juga ada tapi tidak dikasih ruangan, bareng dibangu bangku sama staff lain, dari pusat dikasih akses LAN atau wifi untuk bisa langsung koordinasi sama pusat, terus komputer, fasilitas dalam menunjang PKH di kecamatan Jagakarsa tidak ada. Tapi kecamatan dan kelurahan sangat membantu jika membutuhkan tempat, Contoh Pendamping ingin berkumpul, maka meminjam aula kelurahan, ataupun RPTRA. Tapi mereka (Pemprov) sangat memfasilitasi, tempat, akses.

Puskesmas adalah mitra kemensos, jadi pendamping PKH salah satunya mengecek kesehatan balita, contohnya buku posyandu. RPTRA dikelola oleh pemprov dan ada pengelola jika ingin dipakai maka silahkan izin ke pengelolanya

A: Apakah terdapat kerja sama dengan lembaga, organisasi, ataupun kelompok dalam menjalankan PKH untuk mencapai tujuan? Apa kemudahan yang disediakan dengan adanya kerja sama dengan mitra lain?

B: Bekerja sama denga universitas muestopo, Komponen PKH anak bersekolah hanya sampai SMA, dan berikutnya mereka harus kuliah, maka saya mencari kerja sama dengan universitas, Dan melalui jalur KIP, berkerja sama dengan kemendikbud, anggota DPR, dan muestopo. Syaratnya warga miskin penerima bansos, saat ini 50 orang masuk muestopo ada fisip dan fikom

Pernah ada CSR sama suatu PT berjualan ayam goreng, KPM di fasilitasi gerobak, ayam goreng, dan pelatihan. Di jagakarsa

Di Pemprov DKI dengan Jakpreneurs, KPM bergerak di tahu gejrot Di jagakarsa, di coaching agar berkembang



D. Lampiran 4. 1 Transkrip Wawancara II

Informan Penelitian	Koordinator Kecamatan Jagakarsa Pak Ihsan Latif
Hari/Tanggal	Kamis, 12 Juli 2023

A: Peneliti

B: Informan

A. Sebagai Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan (Koordinator Kecamatan) apa wewenang yang bapak miliki? Dan bagaimana bapak menggunakan wewenang tersebut?

B: Ya, pertama sebenarnya koordinator kecamatan itu secara struktural engga ada, namun ehmm... kebijakan dari korkot dan korwil itu di adakan paling tidak koordinator perkecamatan agar mudah mengkoordinir, namun tapi secara struktural secara kemensosnya tidak ada.

Karena saya diminta menjadi koorcam yaitu tadi pertama mengkoordinir hm... tim kecamatan Jagakarsa bila ada hal hal tugas atau ada hal hal yang perlu di koordinasikan dengan stake holder di tingkat kecamatan ataupun tingkat kelurahan, nah saya mengkoordinir teman teman satu tim, kira kira seperti itu

A: Apa tugas Bapak sebagai Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan (Koordinator Kecamatan)?

B: Ya tugas nya kembali lagi, Koordinator kota untuk mempermudah garis koordinasi kadang lewat saya korcama itu menanyakan tugas tugas yang diberikan di tingkat kota itu sudah dilaksanakan belum oleh SDM di tingkatan kecamatan jagakarsa, ya tugas nya mengkoordinir teman teman SDM sekecamatan jagakarsa untuk bisa melaksanakan tugas tugasnya

A: Apa tanggung jawab Bapak sebagai Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan (Koordinator Kecamatan)?

B: Bila ada sesuatu hal yang berkaitan kendala dengan KPM di jagakarsa, dengan SDM di kecamatan jagakarsa, atau ada hal hal yang perlu di koordinasikan dengan stake holder di kecamatan jagakarsa, nah aaaa saya bertanggung jawab tuh aaa permasalahannya bisa selesai terus bila memang perlu di koordinasikan dengan stake holder di kecamatan saya bisa mengakomodir memfasilitasi untuk bisa bertemu untuk bisa memfasilitasi nah itu tanggung jawab saya ya mungkin tugas pokok agar bisa berjalan sesuai dengan arahan korkot, korwil ataupun kemensos.

A: Koordinasi apa yang bapak lakukan dalam menjalankan PKH sebagai korcam?

B: Nah kadang kalo ada tugas dari kemensos melalui Korwil dan Korkot saya biasanya aaaa sebagai apa sebagai penyambung lah penyambung lidah kepada teman teman tim sekecamatan Jagakarsa, itu ya kami koordinasinya kadang kumpul secara offline atau lewat wa grup, nih ada tugas ini nih targetnya tanggal sekian harus dikumpulkan deadlinenya, kadang bentuk koordinasinya demikian, nah terus kita perlu ketemu sama stake holder di kecamatan atau dikelurahan yuk kita bareng-bareng.

A: Apakah rancangan kegiatan bapak terkait penyaluran bantuan PKH kepada masyarakat?

B: Ya karena kalo karena penyaluran itu sudah ada kebijakannya dari kemensos, apalagi sekarang kemensos menggandeng PT pos ya jadinya aaaa kita aaa SDM PKH yaitu perannya adalah monitoring, monitoring itu memastikan bahwa KPM-KPM yang terdapat dalam SP2D (data Bayar) memang tersalurkan memang sudah menerima bantuannya, kita sifarnya adalah koordinasi dengan himbara maupun PT pos maupun stake holder di kecamatan plus memonitoring memastikan bahwa KPM-KPM kita menerima bantuan

A: Bagaimana mekanisme menurut Bapak terkait penyaluran bantuan PKH?

B: Ya sekarang kembali lagi, sekarang sistem nya sudah berubah dibanding awal ada di Jagakarsa, jadi kan sekarang bentuk penyalurannya, mekanismenya sudah di atur oleh kemensos mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga bayar pun mereka yang memutuskan, termasuk kantor pos, termasuk dengan himbara juga, mekanismenya kita ikut saja, mereka yang menentukan, yaitu kembali lagi tugas kita adalah mengawal, memonitoring, agar bantuan ini sampai ke KPM-KPM sejakarsa.

A: Bagaimana rancangan tindakan dalam melakukan pemeriksaan data peserta yang dimiliki?

B: Ya data peserta ya, biasanya sekarang itu, dulu kan ada sebelumnya itu proses pertemuan awal, validasi, kita melihat data-data mereka, kondisi mereka sekarang, mereka masih layak menerima apa tidak, mereka perlu dibantu apa tidak, dulu prosesnya seperti itu, nah sekarang prosesnya aga berbeda, jadi nya kita kebijakan sekarang itu data itu langsung dari kemensos, kadang kita tidak tau keadaan nya data tersebut, karena kita tidak ada proses validasi lagi, bagaimana melihat home visit kerumahnya ia masih layak apa engga, intinya kita diminta agar bantuan-bantuan tersebut salur pada KPM-KPM yang terdaftar, nah memang bentuknya adalah biasanya adalah rekon, rekonsiliasi dengan bank, ini nama ini belum tersalur dari pihak bank

bagaimana bisa membantu engga, untuk pemeriksaan data saat ini adalah sepenuhnya limpahan given dari kemensos

Dengan adanya perbedaan kebijakan apakah menjadi masalah di Jagakarsa?

Nah iya kadang gitu, kadang aaaa, kita sudah membentuk kelompok-kelompok melalui proses pertemuan kelompok, pertemuan awal, ada validasi kita sudah tau nih jumlah kelompok kita berapa, jumlah KPM kita berapa? Nah saat ini kadang setiap tahap itu jumlah nya berbeda-beda kadang ada nama nama lah kok ada baru lagi namanya gitu segala macamnya, nah memang itu aga kesulitan bagi kita nya, akhirnya kita berkoordinasi dengan pihak RT/RW ataupun ketua kelompok untuk membantu mencari nih karena di data perintah Kemensos ini harus tersalurkan nah itu pertama, jadi kita harus mencari dulu karena datanya baru, kedua memang banyak temuan temuan juga data yang masuk baru itu beberapa ada yang memang layak menerima bantuan dan beberapa memang kondisi statusnya sudah lebih sejahtera jadi memang kadang adalah istilah tidak tepat sasaran juga, kadang diantara warga juga ada yang kok dia dapet padahal sudah sejahtera orangnya, iya bu memang data ini pemberian dari kemensos nya mau buat apa lagi gitu, ya paling nanti kita hanya membuat laporan hanya mendata, oiya si penerima ini sudah sejahtera, dan nanti keputusannya ada di kemensos, apakah tetap dapat atau di hapus data tersebut.

A: Jadi itu laporannya dari pendamping ya?

B: Hmm... biasanya laporannya dari pendamping juga biasanya dari masyarakat dari RT RW nya, Pak nama ini sudah sejahtera pak, pak nama ini sudah punya kontrakan 5 Pak, bahasanya begitulah, kadang begitu, ohh yaaa bu yaa buu, kami data dulu saja, bahwa nama-nama ini sudah sejahtera, karena ada juga yang seharusnya dapat tapi namanya tidak ada, kira-kira begitu

A: Bagaimana pengelolaan dan pengalokasian anggaran dalam menjalankan Program Keluarga Harapan?

B: Yaaa kembali lagi, sebenarnya engga ada anggaran, kita engga ada anggaran, memang kita memanfaatkan yang ada bahasanya, apa namanya hono...r honorarium kita aaa yang memang terbatas, yaudah kadang kadang untuk operasional untuk segala macamnya yaaa itu dari kantong pribadi. Aaaa belum ada khusus yaaa, mungkin ada tapi itu tidak rutin yaaa kaya pelaporan itu setahun sekali aaa jadinya saat ini adalah lebih banyak aaa dari dana sendiri.

A: Mandiri ya?

B: Iya mandiri, tidak ada dana khusus buat operasional segala macamnya itu tidak ada, lebih banyak dari kantong kita sendiri, dan tadi inisiatif inisiatif dari

KPM, misalnya lagi P2K2 kadang kadang mereka inisiatif untuk makan dan segala macemnya, tapi untuk operasional kita pergi koordinasi dan segala macemnya itu mandiri.

A: Bagaimana Pengelolaan dan pengalokasian Sumber Daya Manusia dalam menjalankan Program Keluarga Harapan?

B: Ohhh iyaaa, kalo di kecamatan jagakarsa kan kebetulan kita ada 8 orang (Pendamping) nah kita juga termasuk KPM yang cukup banyak juga, harapannya kan kita sebelum itu kita lihat komposisi nya, kadang dilihat dari banyak nya KPM dari setiap kelurahannya, kelurahan yang banyak kadang plot plotin kita bermusyawarah kita voting, 1 kelurahan ini 2 orang, terus ada yang sedikit cukup 1 orang cukup, ada yang aaaa apa namanya akhirnya yang butuh banyak itu ada yang butuh 3 dan akhirnya kita bagi rata gitu, maksudnya bisa kita bagi rata, yaaa minimal tidak timpang banget, paling tidak ada satu pendamping yang dia juga mendampingi 2 kelurahan, jadi kita azas pemerataan lah paling tidak kita tidak timpang antara satu pendamping dengan pendamping lainnya gitu.

A: Bagaimana Pengelolaan dan pengalokasian Infrastruktur dalam menjalankan Program Keluarga Harapan?

B: Infrastuktur ya, sepertinya ya kita udah, kita infrastrukturnya, kita tidak punya infrastruktur secara mandiri lah bahasanya begitu, kita ini semua berkoordinasi, ya contoh misalkan, aaa kita butuh tempat misalkan aaa ya RPTRA oke, RPTRA itu kan dibawah naungan apa namanya kesra di kelurahan yaudah kita berkoordinasi mengadakan peminjaman tempat RPTRA aaa kumpul atau di aula kelurahan, yaa kita bentuk nya koordinasi saja untuk aula peminjaman, terus juga kurang lebih infrastruktur hal-hal yang itu saja, kita minjam tempat, sisanya ya untuk operasional dan yaa segala macam nya ya kita lebih kemandiri SDM PKH sendiri.

A: Apakah terdapat kerja sama dengan lembaga, organisasi, ataupun kelompok dalam menjalankan PKH untuk mencapai tujuan? Adakah kemudahan lain yang disediakan bekerja sama dengan mitra?

B: Ya aaa memang kita salah satunya diminta untuk berkolaborasi PKH tidak dapat berdiri sendiri gitu ya, aaa kita pun juga pernah dikumpulkan aaa oleh pihak-pihak kecamatan kita bersama sama dengan piral piral sosial lainnya, dengan tagana dengan PSM dengan PKK segala macemnya jadi kita tidak dapat berdiri sendiri jadi kita berkolaborasi, aaaa dengan pusdatin PJP mengenai data di kelurahan, berkoordinasi juga, jadinya aaa kita berkoordinasi berkolaborasi bersama sama untuk bisa tadi nih bisa terwujudnya tujuan PKH, selain itu juga aaa dari pihak kor... kota., aaa korwil itu juga aaa melihat juga kalau KPM-KPM ini punya potensi contohnya punya potensi usaha misalkan gitu dari korkot atau korwil memberikan jalannya

bahasanya gitu, untuk bekerja sama dengan pihak swasta untuk pengembangan usaha KPM ini, sebelumnya pernah juga di jagakarsa alhamdulillah kita pernah dapet aaaa bekerja sama dengan namanya aaaa namaya tuh ayam geprek jambilah waktu itu tuh KPM-KPM kita yang udah usaha memiliki potensi itu diberikan bantuan gerobak itu dah bahasanya dan bantuan pelatihan untuk usaha ayam geprek, itu salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan, jadi tidak hanya KPM ini graduasi tidak hanya mengandalkan bantuan tapi juga dia bisa mandiri, bisa graduasi bisa berbagi bisa sejahtera jadinya ya kita bekerja sama dengan beberapa lembaga salah satunya untuk membuat KPM-KPM ini naik kelas atau graduasi.

B: Ya kembali lagi kalo kita kerja sama dengan lembaga-lembaga stake holder ya inshaa allah apalagi ini dibidang sosial ya, inshaa allah ada jalannya saja, kita dipermudah aaa ya kembali lagi kaya tadi kita aaaa tidak usah sulit sulit mencari tempat untuk P2K2 atau FDS kita cukup menginfokan ke kesra untuk izin penggunaan RPTRA nah itu dengan gratis misalnya begitu, nah itu selain itu aula di kelurahan yang gratis, ya kalau kita bisa mempunyai hubungan baik dengan stake holder inshaa allah kemudahan itu akan kita rasakan juga.



E. Lampiran 5. 1 Transkrip Wawancara III

Informan Penelitian	Koordinator Wilayah Provinsi DKI Jakarta
	Pak Andi Mawardi
Hari/Tanggal	Senin, 13 Juli 2023

A: Peneliti

B: Informan

A: Sebagai Pelaksana Program Keluarga Harapan Wilayah (koordinator wilayah) apa wewenang yang Bapak miliki? Dan bagaimana Bapak menggunakan wewenang tersebut? Apa tugas Bapak Sebagai Pelaksana Program Keluarga Harapan Wilayah?

B: Pertama, tugas saya mengkoordinasikan seluruh bisnis proses PKH di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Baik itu Dinas Sosial sebagai pelaksana juga di tingkat Provinsi maupun

Pemerintah Daerah. Dan melalui ini Gubernur, Staff Gubernur, juga Pemerintah Daerah yang memang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan, demikian juga Bapeda.

Jadi intinya tugas saya dalam rangka, pertama mengorganisasi, kedua bagaimana organisasi PKH ini dapat berjalan dengan baik hasil dari koordinasi dari Pemerintah Daerah. Terus selanjutnya, melakukan pengendalian terkait dengan bisnis proses PKH di lima kota satu kabupaten Pulau Seribu. Dan selanjutnya, melakukan maping kebutuhan SDM PKH di Provinsi DKI Jakarta yang ada kaitannya dengan jumlah KPM.

Jadi jumlah KPM tuh idealnya setiap pendamping itu sesuai dengan regulasi 350 per pendamping. Contohnya DKI Jakarta sekarang ini sudah tidak ideal lagi, karena jumlah pendamping yang hanya 224. Sementara, KPM nya di tahap 1 ini sampai 124.000 lebih, nah ini kan menjadi timpang di situ. Itu bagian dari tugas kami.

Terus selanjutnya, juga melakukan kerjasama dengan pihak penyalur. Dalam hal ini, Himbara (Himpunan Bank-bank Negara) dan juga PT Pos yang dipercaya oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan Bansos. Nah, Bansos itu tentu saja ada yang berupa sembako maupun berupa uang.

Dalam era kali ini, memang semuanya diluncurkan dalam bentuk uang tidak lagi sembako. Misalnya, tahun ini sembako tahap 1 bulan Januari, itu tidak lagi dengan berupa barang, tetapi berupa uang semua yang bisa disalurkan di Bank maupun di PT Pos. Jadi itu bagian-bagian dari tugas saya, tentu saja melakukan evaluasi terkait dengan kinerja para pendamping di seluruh Provinsi DKI Jakarta

A: Apa tanggung jawab Bapak Sebagai Pelaksana Program Keluarga Harapan Wilayah?

B: Tanggung jawabnya pertama memastikan bantuan sosial khususnya PKH dan sembako itu diterima oleh para KPM. Dan juga serapan Bansos DKI Jakarta itu signifikan. Dan Alhamdulillah DKI Jakarta ini sudah 98% penyerapannya. Kalaupun itu tidak ada yang terserap, karena meninggal, orangnya pindah, dan tidak bersyarat lagi. Karena memang di PKH itu ada syarat-syarat tertentu yang mereka harus lakukan. Misalnya, anaknya tidak sekolah lagi maka dengan sendirinya bantuan itu mereka tidak dapatkan lagi, yang akhirnya keluar dari PKH. Dan banyak lagi hal-hal yang memang tidak terserap. Orangnya sudah tidak tinggal lagi di Jakarta misalnya dia kembali ke daerahnya. Dan ini akan kembali ke kas negara.

Jadi kemarin tahap 1 sudah kita laporkan, memang tidak 100%. Karena memang susah kalau kita bicara Bansosnya 100%. Karena di DKI Jakarta ini penduduknya kan nomaden pindah-pindah, kontrak sana kontrak sini. Jadi menyulitkan kami mencari alamatnya. Bisa saja orangnya masih ada di Jakarta, tapi tidak kita ketemui. Maka kita laporkan disana atas dasar informasi dari para ketua RT. Mereka melaporkan tidak ditemukan dan akhirnya bantuan sosialnya kembali ke kas negara.

Jadi yang pertama itu tugasnya memastikan KPM mendapatkan bantuan sosialnya begitu dengan baik. Kedua pengendalian bisnis proses PKH terkait dengan VerVal baik itu pengaduan-pengaduan maupun bagaimana pengendalian SDM PKH di lapangan bekerja sesuai dengan regulasi di PKH.

A: Sebagai Pelaksana Program Keluarga Harapan Wilayah bagaimana Bapak melakukan koordinasi dalam menjalankan PKH?

B: Koordinasi pertama dilakukan dengan rapat, pertemuan langsung dengan instalasi terkait. Seperti tadi pagi saya melakukan koordinasi langsung datang ke PT Pos. Karena banyak pengaduan terkait dengan penyaluran PT Pos yang kurang optimal dan kami sudah lakukan koordinasi dan rapat dilakukan penyelesaian oleh PT Pos dengan baik.

Juga dengan Himbara dalam hal ini kita BNI dan BRI. Kita datang ke mereka atau kita mengundang mereka untuk melakukan koordinasi atau per telpon, atau kita rapat melalui zoom. Jadi banyak media yang bisa kita lakukan, di samping kita bertemu secara langsung, kita juga melakukan rapat koordinasi via zoom atau kita juga bentuk grup WA (Whatsapp). Nah disitu ada yang namanya grup Rekon. Jadi misalnya ada dari kami per KPM 124.000 misalnya. Nanti dari Bank maupun dari PT Pos kasih laporan ke kita bahwasanya ada yang belum melakukan transaksi di daerah Jagakarsa misalnya. Nanti pendamping mencari siapa-siapa yang belum melakukan transaksi. Apakah dia sudah mengetahui bahwasanya dia mendapatkan Bansos atau memang orangnya tidak ada disitu. Karena memang banyak KPM KPM baru yang

metodenya dia tidak tahu ada di data bayar dan akhirnya tidak melakukan transaksi untuk mendapatkan bantuan sosialnya.

A: Bagaimana Anda akan berkomunikasi dengan masyarakat tentang Program Keluarga Harapan dan bagaimana mengatasi potensi disinformasi atau kurangnya pemahaman tentang program tersebut?

B: Aaa... kami harus melakukan secara intens yaaa... sosialisasi dan edukasi pada masyarakat gitu, dan kebetulan aaa saya selalu amm... melakukan kunjungan sampai ke tingkat KPM itu ketika teman teman sedang melakukan pertemuan kelompok yang di isi dengan P2K2 tadi dan saya langsung turun kesitu gitu menyampaikan aaa edukasi bahwa PKH mempunyai sebuah tujuan, regulasi PKH itu seperti apa selanjutnya kita juga aaa tidak lupa menyempatkan datang ke pemerintah setempat ke kelurahan, RT/RW bahkan saya sebagai korwil siap sedia di undang sampai ke tingkat RW untuk menjelaskan itu gitu, untuk menjelaskan PKH itu apa, sehingga tidak ada salah informasi terkait program itu sendiri. Jadi jangan sampai ada yang beranggapan aaa tidak tau terkait PKH padahal program ini adalah program nasional yang sedia nya aaa apapun itu pejabat seharusnya tahu tentang PKH.

A: Apa rancangan kegiatan Bapak terkait penyaluran bantuan PKH kepada masyarakat? Bagaimana mekanisme menurut Bapak terkait penyaluran bantuan PKH?

B: PKH itu sendiri, yang memiliki anggaran itu sendiri, jadi aaaa.... Apa jadi itu ... jadi gini aaa... Kementerian Sosial dalam hal ini yakan pusat dalam hal ini mereka ini kan anggaran APBN anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat gitu alokasi nya sudah jelas jadi sistim penyalurannya adalah aaa kementerian sosial yakan menyerahkan uang ke penyalur yakan baik PT. Pos maupun HIMBARA nah nanti HIMBARA ini yang memasukan ke rekening mereka gitu lho ya, itu namanya salur, di HIMBARA nama nya salur ketika itu sudah salur, rekeningnya ada uangnya. Nah selanjutnya yakan, data-data tersebut yakan aaa... akan di sebar ke masing-masing cabang mereka tuh dan kami juga mendapatkan data tersebut dari Kementrian Sosial bahwasannya di DKI Jakarta ada 100ribu misalnya di bank juga ada 100ribu begitu juga di PT Pos gitu nah uang yang sudah masuk ke PT Pos tersebut yakan akan di salurkan oleh PT Pos ataupun HIMBARA tersebut dengan yakan pantauan kami misalnya aaa... ada KPM-KPM ini melakukan pengaduan juga ke kami aaa.... Kami seharusnya mendaptkan 1juta tapi hanya mendapatkan 700ribu kita cek di data kami, 700ribu atau 1Juta ketika ada perbedaan kita mengecek lagi kesana, begitulah advokasi kami kepada KPM terkait penyaluran bantuan PKH, Jadi memang uang yang diserahkan kepada HIMBARA itu Pusat Kementerian Sosial dalam hal ini yang mengisi rekening itu adalah HIMBARA atau PT Pos yang memberikan langsung. Dan nanti para KPM itu akan

mengambil sendiri ke ATM atau PT Pos langsung dia di datangi oleh petugasnya secara tunai.

A: Bagaimana Anda berencana untuk memonitor dan mengevaluasi dampak jangka panjang dari Program Keluarga Harapan terhadap masyarakat?

B: Aaa... yang saya lakukan pertama saya langsung turun kelapangan yang pertama mewawancarai para KPM sejauh mana aaa... efek dari aaa... pengaruh dari Program Keluarga Harapan itu bagi mereka yang mendapatkan bantuan tersebut itu pertama dan terus kedua aaa.... Melakukan evaluasi yang mendalam kepada SDM PKH nya juga karena mereka juga mempunyai target aaa... untuk melakukan pemberdayaan bagi KPM itu baik di ingin memasukan kedalam dunia usaha yakan karena didalam PKH itu ada yang namanya PENA (Pahlawan Ekonomi Nasional) disitu yang kita coba majukan kepada KPM untuk mendapatkan bantuan dari usaha tersebut UMKM dan selanjutnya itu tadi, kita memasukan mereka ke Universitas jika dia sudah lulus dari SMA jadi tugas kami tentu saja mendatakan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan itu dan mewawancarai langsung sejauh mana efek dari keberhasilan PKH itu sendiri di DKI khususnya tapi yang jelas informasi yang kita dapat dari mereka aaa.... Bantuan sosial itu bisa dibuat modal, kebutuhan dia sehari-hari intinya bantuan sosial ini memang salah satu yang diandalkan dalam keluarga tapi memang sekali lagi tugas kami bagaimana caranya mereka tidak berfikir seperti itu jadi harus berfikir tanpa bantuan sosial mereka bisa berjaya. Itu tugas kami merubah perilaku tersebut.

A: Apa langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai departemen dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan?

B: Aaa... dalam hal ini saya kan pelaksana dibawah dinas sosial tentu saja terkait dengan koordinasi ketingkat jajaran Provinsi DKI Jakarta ini aaa.... Berdasarkan instruksi atau memang aaa... berdasarkan aaa.... Intensitas pertemuan setiap aaa.... Bulannya di kegiatan tersebut misal saja ada kegiatan P2K2 yang harus di hadiri oleh pihak tenaga kesehatan puskesmas dalam hal ini, nah ini sebelum itu dilakukan nah kita pasti sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu jadi intinya aaa... aaa... kerja sama dengan instansi terkait itu dilakukan tidak dari atas tapi justru dari bawah gitu oleh teman-teman pendamping kalau misalnya dari urusan pendidikannya langsung dengan sekolah-sekolah kalau dari urusan kesehatannya dengan posyandu ataupun puskesmas karena kita kalau dari atas ternyata layanan itu ada dibawah jadi justru teman-teman kita instuksikan untuk melakukan penjadwalan terkait dengan koordinasi setiap instansi baik instansi pendidikan ataupun kesehatan. Nah kalau kami lebih kepada aaaa.... Membukaa peluang mereka itu menjadi lebih baik lagi msial saja aaa... itu tadi tingkat pendidikan yakan teman-teman bagaimana merawat anak yang sekolah tetap sekolah nah kalo

kami ketika sekolah dan lulus dan disitu memiliki peran ketingkat atas untuk kami bermitra dengan universitas moestopo, UNJ untuk memasukan mereka dengan jalur KIP yang gratis, kami sudah berkerja sama dengan moestopo, UNJ dan juga Universitas UICI yang apa yang online itu, kami si berharap universitas-universitas yang lain itu bisa berkerja sama dengan kami gitu ya, karena setiap universitas itu kan ada KIP nya tuh, yakan jadi kalo kami itu jelas penerima beasiswa nya, mereka ada di DTKS, ketika ada pemeriksaan pun, pasti aman, karena yang saya tahu gitukan dan begitu ada pemeriksaan universitas-universitas itu aga bingung begitu di cek mohon maaf gitu penerimannya engga jelas bahkan mungkin maaf, orangnya dekan sendiri, orangnya dosennya sendiri keluarga nya, padahal bukan penerima bantuan tersebut, kalo kami jelas ketika ada pemeriksaan, mereka aman (Universitas moestopo, UNJ, dan UICI) dan dalam waktu dekat kami akan memasukan anak KPM PKH ke Universitas Moestopo lagi dan mereka senang bekerja sama dengan PKH khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

A: Bagaimana pengelolaan dan pengalokasian anggaran dalam menjalankan Program Keluarga Harapan?

B: Anggaran ini anggaran aaa... apa namanya anggaran operasional atau anggaran PKH nya? Kalo kami memang tidak punya anggaran operasional untuk kita yang kelola karena kami tidak mengelola dana operasional, untuk anggaran KPM pure semua masuk kerekening KPM, itu lah bantuan yang diterima pemerintah DKI dan langsung diterima oleh KPM tidak ada lagi dana dana yang kita kelola unutk melakukan bisnis proses PKH.

A: Bagaimana Anda akan memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan digunakan secara efisien dan transparan?

B: Teman-teman pendamping juga dalam setiap pertemuan tadi selalu melakukan pengarah dan melakukan pertanyaan pertanyaan kepada KPM dan selalu memantuan setiap penyaluran karena pertemuan mereka setiap bulan sekali, penyalurannya hanya 3 bulan sekali berarti cukup waktu teman-teman melakukan edukasi dan sosialisasi bahwasannya uang yang didapat itu tidak boleh digunakan untuk beli pulsa misalnya, untuk merokok bapaknya tapi selain itu boleh, misalnya dia karena KPM nya sangat terbelakang ini dia pilihannya ongkos atau beli beras gapapa dia beli beras gitu karena kalo dikasih ongkos sekolah tapi engga bisa makan gitu ya kan repot jadi perut dulu yang dipikirin kalo perutnya sudah baru pendidikannya, jadi itu yang kita pantau dilapangan jadi sangat fleksibel hanya saja ada larang larangan untuk sesuatu yang negatif, merokok beli pulsa, atau hal hal lain yang tidak sesuai dengan regulasi di PKH.

A: Bagaimana pengelolaan dan pengalokasian Sumber Daya Manusia dalam menjalankan Program Keluarga Harapan?

B: Aaa... kita selalu melakukan pemetaan yaaa itu tadi yang saya sampaikan di awal jadi pemetaan itu aaa... dilakukan sesuai dengan KPM yang ada diwilayah tersebut, misalnya kecamatan Jagakarsa KPM nya ada 1.000 jadi disitu cukup 3 pendamping dan 1 koordinator. 3 pendamping ini yang akan melakukan bisnis proses PKH di kecamatan tersebut, untuk melakukan kegiatan dengan baik. Mereka juga disamping melakukan proses bisnis PKH secara utuh sebagai pendamping sosial mereka juga melakukan koordinasi-koordinasi dengan instansi lain untuk melakukan hak KPM terkait dengan komplementaritas misalnya di DKI Jakarta ada KJP diharapkan pendamping sosial PKH itu juga memastikan kepada KPM sudah mendapatkan KJP apa belum? Gitu lho misalnya disini ada KLJ ada Kartu penyandang disabilitas, nah itu yang dilakukan pendamping bekerja sama dengan pemerintah daerah khususnya instansi-instansi yang mengelola bantuan sosial diluar PKH.

A: Untuk meningkatkan SDM PKH nya sendiri bagaimana?

B: Kalau itu saya setiap bulan sekali menginstuksikan kepada koordinator kota atau kepada koordinator kabupaten untuk melakukan penjadwalan pertemuan bagi SDM PKH diwilayah masing-masing nah disitu saya turun yakan memberikan arahan, memberikan edukasi, sosialisasi, barangkali ada informasi terbaru dari Kementerian Sosial atau Jaminan Kesejahteraan Sosial untuk menjalankan proses bisnis PKH misalnya saja terkait dengan pelaporan, sekarang pelaporan *by online* dan sudah tidak lagi manual, teman-teman hp nya tuh penuh dengan laporan begitu kita lapor langsung ngelink, tadi foto nih semisalnya saya laporkan itu laporan langsung ngelink kesana saya berada dimana dan sinyal foto ada dimana, itu jadi yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas SDM PKH jadi melakukan penjadwalan yang di fasilitasi oleh para karkot dan dsitulah saya bersama dengan sudin masing-masing hadir disitu memberikan arah sesuai dengan regulasi PKH sebelumnya maupun ada informasi terupdate dari Kementerian Sosial.

A: Bagaimana pengelolaan dan pengalokasian Infrastruktur dalam menjalankan Program Keluarga Harapan?

B: Kami disekertariaatan mendapatkan komputer yang disampaikan oleh Kementerian Sosial yang itu diberi tanggung jawab barang tersebut ke dinas sosial Provinsi nah kalau di kota itu sudin sosial yang menerima gitu lho sebagai institusi nah dalam perawatan dan penggunaannya kami yang melakukannya, saya punya ruangan sendiri alat-alat ini saya yang gunakan dan saya yang rawat, jadi intinya fasilitas diberikan ke instansi Dinas Sosial namun kami yang menggunakannya untuk proses bisnis PKH.

A: Kalau untuk implementasinya pak, untuk pendamping atau KPM nya sendiri pak?

B: Kalau implementasi nya sendiri P2K2 kita mempunyai anggaran P2K2 diberikan oleh Kementerian Sosial setiap bulan biasanya maksimal 500ribu jadi total yang bisa kita dapatkan 1,5Juta kita dapatkan uang operasional untuk uang P2K2 tersebut jadi anggarannya ada dan itu jauh dari cukup karena satu pendamping itu bisa saja dia punya 5-10 kelompok dan jaraknya juga lumayan-lumayan mereka juga perlu sarana yang lebih baik sebenarnya, Alat untuk mensupport kegiatan mereka segala macam, jadi yang jelas ada tetapi memang tidak cukup untuk memfasilitasi mereka.

A: Fasilitas untuk alat nya pak untuk PKH?

B: Kaya hp itu kita milik sendiri, motor kita milik sendiri, fasilitas-fasilitas menunjang itu hanya ada di sekertariat (korwil & Korkot) itu tadi komputer, mesin print, dan sekarang udah tidak dibiayai lagi, dikasih saja uang perawatan pun tidak ada dari kementerian Sosial, jadi itu yang dilakukan oleh kami, semua yang awalnya di biyai oleh kementerian sosial sekarang sama sekali tidak, karena ada perubahan kebijakan dari menteri yang baru, yang awalnya ada dana dekon, dan sekarang tidak ada lagi dana dekon. Kan sebenarnya itu ketika menjadi Program pusat pasti harus ada anggaran yang dititipkan untuk pengelolaan program untuk apa? Untuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada program tersebut, kalo begini ya akhirnya mati tidak mau hidup pun susah ini yang terjadi di PKH di seluruh provinsi di indonesia

A: Apakah Anda memiliki rencana untuk berkolaborasi dengan sektor swasta atau organisasi masyarakat sipil dalam mengoptimalkan manfaat dari Program Keluarga Harapan?

B: Saya dibidang ekonomi bekerja sama dengan jakpreneur dan dengan PT. ABC di bidang pendidikan kita bekerja sama dengan Universitas Moestopo, UNJ, dan UICI, jadi itu yang sedang kita garap, yang sedang jalan disitu, untuk kerja sama dibidang lain butuh perjuangan juga karena mereka juga sudah punya kegiatan dengan yang lain, memasukan tidak semudah itu.

A: Bagaimana pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam implementasi PKH? Apa kemudahan yang disediakan dengan adanya kerja sama dengan mitra lain?

B: Aaaa.... Melibatkan seluruh sektor yang dari tingkat RT-RW sampai ketinggian wali kota, contohnya saja terkait dengan pendaftaran DTKS itu kan dilakukan dari tingkat kelurahan (muskel; Musyawarah Kelurahan) dimana mulai penetapan dari masyarakat miskin itu siapa saja yang dapat program itu dilakukan oleh tingkat kelurahan itu diolah di tingkat kecamatan, tingkat kecamatan kirim ke kota, kota ke provinsi jadi, dari yang paling bawah sampai pusat terlibat untuk PKH (mengetaskan kemiskinan) sudah ideal kah, jika

bicara ideal pun memang sulit, karena yang ingin dibantu itu banyak alokasi anggaran itu terbatas sebenarnya kan apapun itu regulasinya jika yang miskin itu belum tertangani ya keberhasilan program itu sendiri masih ditanyakan karena memang PKH saja se Indonesia baru 10 juta namun jika kita berbicara kemiskinan di Indonesia kan lebih dari itu berarti kan ada yang tidak terlayani oleh program tersebut, nah ini kalau berbicara kepuasan ya pasti, belum ideal sebenarnya implementasinya sudah cukup bagus kerja sama pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan adanya muskel itu ditingkat kelurahan, untuk penetapan siapa yang menerima bantuan sosial.

B: Ya kalo kemudahan dalam kami SDM PKH tidak ada memang dalam konteks itu tapi dalam kemudahan bagi penerima manfaat itu jelas, kenapa yang tadi anaknya gabisa kuliah mereka sudah bisa kuliah dengan gratis gitu walaupun angkanya belum signifikan, tahun 2022 di moestopo ada 22 orang yang berhasil masuk di UICI ada 43 orang jadi intinya kemudahan dalam sisi KPM nya itu sendiri.

A: Bagaimana bapak menilai keberhasilan PKH? Dan apa indikator penilaiannya pak?

B: Aaa.... Kan setiap penilaian itu kan tergantung persepsi ya kalau saya sebenarnya terkait dengan PKH sendiri karena sasarannya bukan persoalan ekonomi saja tapi persoalan hidup dan kehidupan dimana memang perilaku itu yang sangat penting ya yang harus ditanamkan di setiap orang yang menerima dan juga di dalam masyarakat yang tidak menerima memikirkan cara untuk menerima, menurut saya sulit satu sisi bagaimana mengeluarkan KPM agar tidak menerima tapi di satu sisi banyak orang yang datang menjadi KPM ini kan menurut saya tidak pas ketika kita bisa mengubah perilaku KPM atau masyarakat disekeliling kita bahwasannya bansos itu bukan tuuan untuk ekonomi mereka bahwasannya pemberdayaan adalah yang harus mereka lakukan dan itu dilakukan dengan baik, dan itulah saya rasa tingkat keberhasilannya jadi ya ketika perilaku KPM menjadi lebih baik yang sudah berdaya dan bisa menolong diri nya sendiri itulah keberhasilan yang didapat, tidak berbicara ekonomi tapi bicara perilaku

F. Lampiran 6. 1 Transkrip Wawancara IV

Informan Penelitian	Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan Jagakarsa Ibu Shely Whidiyanti
Hari/Tanggal	Jumaat, 21 Juli 2023

A: Peneliti

B: Informan

A: Sebagai Kasatpel Sosial Kecamatan Jagakarsa Apa wewenang yang ibu miliki di dalam Program Keluarga Harapan? Apa tugas ibu dalam Program Keluarga Harapan?

B: Kita sebatas, sebenarnya kita karena perwakilan sosial di kecamatan, jadi kita memfasilitasi, andai kata ada KPM yang bermasalah, misalnya kartunya terblokir dan lain lain, misalkan mereka mengadu kesini nanti kita arahkan ke pendampingnya masing-masing, dan begitu pun jika memang ada misalnya pendistribusian kartu, memerlukan tempat, tenaga, jadi biasanya pendamping lapor ke saya nanti saya fasilitasi ke tingkat kecamatan dan kelurahan, jadi dari kelurahan nanti ada yang membantu nih, entah tempatnya atau kemudian tenaganya misalnya, tenaga nya kurang dari pendamping, misalnya dibantu oleh kasikesranya, atau PPSU nya, seperti itu

A: Apa tugas ibu dalam Program Keluarga Harapan?

B: Tugas Spesifik tidak ada si, karena semuanya pure dari pendamping

A: Apa tanggung jawab Ibu dalam Program Keluarga Harapan?

B: Untuk tanggung jawabnya lebih kepada monitoring, permasalahannya, atau ada nya pendamping-pendamping yang kinerjanya kurang baik, atau ada nya temuan, itu hanya sebatas monitoring kinerja dan permasalahan.

A: Setelah ada monitoring apa ada tindak lanjut lagi bu?

B: Ya jadi misalnya ada temuan, misalnya ada kasus misalnya ATM nya di pegang pendamping padahal KPM nya sudah meninggal misalnya, dan masih dipergunakan itu kan bentuknya kriminal ya, nanti baru kita laporkan ke koordinatornya, atau ketingkat sudin, nanti sudin yang akan melaporkan kepada karkotnya (koordinator Kota) nanti akan di tindak lanjut.

A: Menurut Ibu, Bagaimana koordinasi yang dilakukan dalam Program Keluarga Harapan? Apakah sudah berjalan baik?

B: Koordinasi apa maksudnya?

A: Mungkin ada informasi dari tingkat atas, untuk di beritahukan kepada KPM, atau pada saat itu KPM nya tidak dapat menangkap informasi yang diberikan, atau kurang jelas

B: Sebenarnya Kalo untuk koordinasi lebih kepada pendamping ya, dari kemensos ke koordinator wilayah ke koordinator kota ke koordinator kecamatan dan pendamping kelurahan, jadi lebih kepada pendampingnya, nah biasanya kalau sedang ada sesuatu yang besar seperti pendistribusian itu koordinator kecamatan lapor ke saya, kalau masalahnya yang kecil-kecil seperti ATM terblokir, sudah tidak dapat lagi, itu sudah bisa di handle oleh pendampingnya masing-masing.

A: Menurut Ibu, Apakah Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jagakarsa sudah tepat sasaran?

B: Hmm.... PKH di Jagakarsa, terus terang Karena saya baru sebulan saya belum memastikan dan melihat secara langsung KPM nya seperti apa, jadi saya belum bisa menjawab itu, apakah tepat atau tidak, tapi belum ada temuan, belum ada yang mengadu, belum ada yang melihat sendiri bahwa belum tepat sasaran.

A: Menurut Ibu, Apakah Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jagakarsa sudah sampai hasil yang di inginkan? Apakah ada target dari Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jagakarsa

B: Hasil yang di inginkan itu maksudnya seperti apa ya?

A: Mungkin seperti banyak perubahan prilaku KPM menjadi lebih baik

B: Karena saya belum ada report nya jadi saya belum bisa jawab, yang saya tahu Program Keluarga Harapan memiliki kegiatan untuk melakukan edukasi, nama nya apa ya saya lupa.... P2K2, melakukan edukasi kepada KPM agar KPM dapat menjadi mandiri, nah itu saya dapat laporan masih berjalan tapi saya belum liat langsung dan melihat hasilnya.

A: Menurut Ibu, Apakah ada anggaran dalam menjalankan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jagakarsa?

B: Anggaran apa?

A: Anggaran operasional untuk para pendamping dalam menjalankan Program Keluarga Harapan?

B: Karena Satpel sosial tidak memegang anggaran,Mas. Jadi saya tidak bisa menjawab itu, saya jawab tidak ada karena saya tidak memegang anggaran apapun. Anggaran pribadi iya.

A: Menurut Ibu, Apakah bantuan yang di terima KPM dikelola sesuai kewajibannya?

B: Kalau itu kembali lagi, belum ada aduannya, jadi saya sampai sejauh ini belum ada aduan, jadi saya gatau nih di pakai sebagaimana mestinya atau gimana ya.

A: Menurut Ibu, Bagaimana Sumber Daya Manusia (Pendamping) dalam menjalankan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jagakarsa?

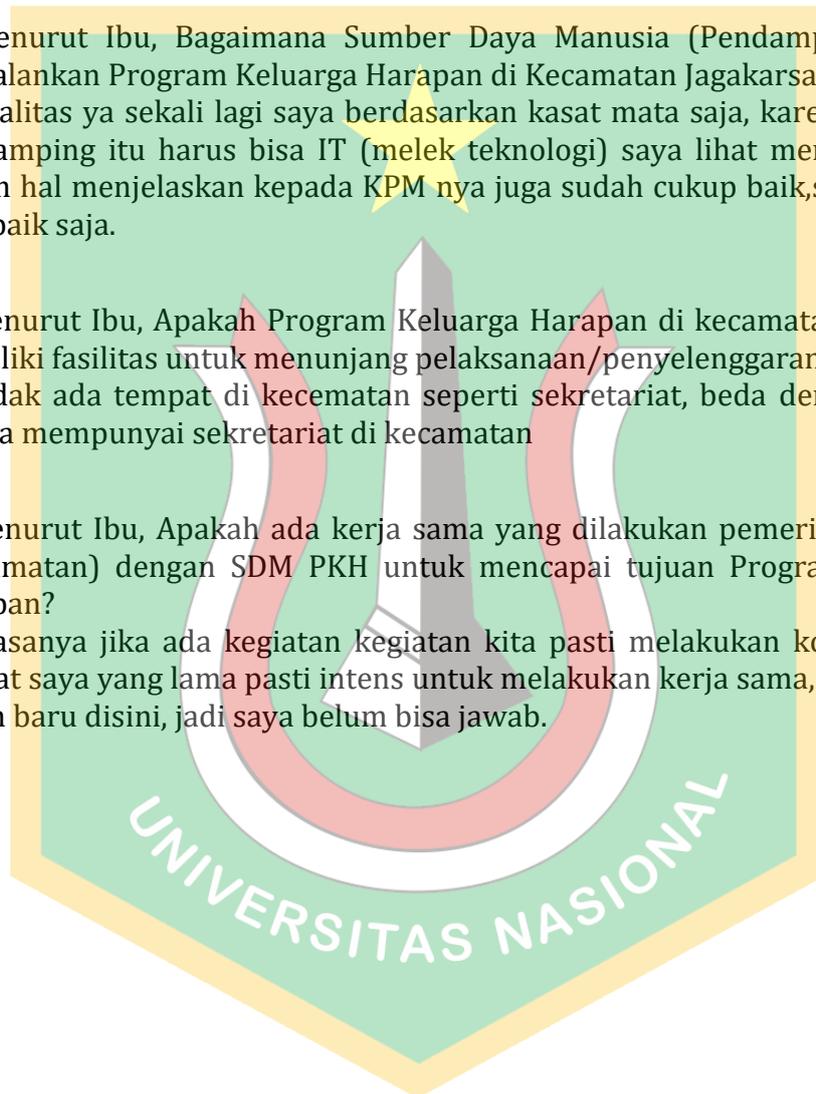
B: Kualitas ya sekali lagi saya berdasarkan kasat mata saja, karena rata-rata pendamping itu harus bisa IT (melek teknologi) saya lihat mereka paham. Dalam hal menjelaskan kepada KPM nya juga sudah cukup baik,sejauh ini ya baik baik saja.

A: Menurut Ibu, Apakah Program Keluarga Harapan di kecamatan Jagakarsa memiliki fasilitas untuk menunjang pelaksanaan/penyelenggarannya?

B: Tidak ada tempat di kecamatan seperti sekretariat, beda dengan karang taruna mempunyai sekretariat di kecamatan

A: Menurut Ibu, Apakah ada kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah (Kecamatan) dengan SDM PKH untuk mencapai tujuan Program Keluarga Harapan?

B: Biasanya jika ada kegiatan kegiatan kita pasti melakukan koordinasi, di tempat saya yang lama pasti intens untuk melakukan kerja sama, karena saya masih baru disini, jadi saya belum bisa jawab.



G. Lampiran 7. 1 Transkrip Wawancara V

Informan Penelitian	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Jagakarsa
	1. Ibu Dana 2. Ibu Erin 3. Ibu Sani
	Hari/Tanggal
	Selasa, 25 Juli 2023

A: Peneliti

B: Informan

A: Bagaimana informasi yang disampaikan pendamping terkait informasi/kebijakan baru? Apakah mudah dimengerti?

B: mudah si dimengerti

B: Mudah dimengerti

A: Bagaimana informasi yang diberikan pendamping untuk di infokannya?

B: Informasi yang diberikan pendamping, di share ke grup dari ketua kelompok

A: Apakah setiap KPM PKH memiliki grup wa untuk mempermudah penyebaran informasi dan koordinasi?

B: Ya ada

A: Jika Ibu mengalami kendala, apa yang ibu lakukan?

B: kalo masalah bantuan tidak terkendala

A: Apakah ibu pernah melihat ada nya KPM yang sudah mapan?

B: Maksudnya yang udah mapan gitu?

B: Harus nya dia engga berhak

B: Tapi saya kayanya yang kaya gitu engga ada ya ...

B: Iyaaa ...

B: Iyaaa engga

A: Apakah Ibu mengalami kesulitan untuk melakukan pencairan dana bantuan sosial PKH?

B: Engga ada si

B: Engga ada

B: Lancar lancar...

A: Apakah Ibu menggunakan dana bantuan sosia PKHl sesuai aturan?

B: Buat makan kita

B: Iya buat kedapur larinya

B: Buat anak sekolah

A: Apakah Ibu mendapat dana bantuan sosial, sesuai komponennya?

B: Iya sesuai

B: Sesuai

B: Alhamdulillah sesuai

A: Apakah para pendamping melakukan edukasi dan sosialisasi terkait bantuan yang diterima?

B: iya

B: iya

B: iya

A: Apakah Ibu mendapatkan kemudahan untuk mengakses pendidikan?

B: kemarin ada yang dishare di group jika ada anak yang lulus sekolah nih atau mau masuk kuliah itu bisa tuh di ... moestopo



H. Lampiran 8. 1 Transkrip Wawancara VI

Informan Penelitian	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Jagakarsa
	1. Ibu Savitri Nissa Devi 2. Pak Wahyu Ramadhan 3. Pak Walada Afton Abiyasa
Hari/Tanggal	Rabu, 26 Juli 2023

A: Peneliti

B: Informan

A: Bagaimana Bapak/Ibu menyusun rencana kerja PKH di wilayah kecamatan Jagakarsa?

B: Biasanya kita di akhir bulan tuh ada laporan untuk bulan ini ya, ini kan juli ya, nanti di akhir bulan kita bikin laporan, kemaren di bulan juli kita melakukan apa saja gitu, sama sekalian apa namanya, membuat, rencana di bulan depannya gitu, bulan agustus. Untuk kegiatan rutinnnya kan kita ada yang namanya P2K2 tuh atau FDS, ngasih materi ke KPM, itu kegiatan rutin nya, nah untuk yang laen-laen kita menyesuaikan aja sama kondisi wilayah, kalo yang lain-lainnya tergantung sama masing-masing, kadang ada yang butuh koordinasi dengan kesranya, ada yang senengnya kekelurahan mulu, ada yang senengnya ke KPM mulu, ada yang ke sekre mulu, ya jadi beda-beda setiap pendamping punya rencana kerjanya beda-beda, cuman yang pastinya FDS itu.

B: Rekonsiliasi udah pasti, terkait bantuan yang engga cair, atau engga KPM nya yang belum transaksi kenapa ini, itu semua udah rutin setiap bulan rutin, kalau abis penyaluran tiap bulan rutin begitu engga mungkin engga dah karena itu perintah juga dari atasan. Terkait rencana kerja setiap pendamping punya rencana kerja masing-masing.

A: Bagaimana koordinasi yang dilakukan pendamping terkait sosialisasi kebijakan dan bisnis PKH kepada aparat pemerintah, KPM PKH, dan masyarakat umum?

B: itu terkait program dari kemensos khususnya PKH.

B: Biasanya itu pas awal, pas pertemuan awal

B: Pertemuan awal sama penerima nya sama KPM nya itu kita sosialisasi itu biasanya kita validasi terus dia sudah dinyatakan sebagai penerima bantuan PKH nah kita melakukan proses sosialisasi, dan juga pada aparat maksudnya kaya RT/RW kelurahan nah itu juga kita melakukan sosialisasi soalnya tidak semua nya RT/RW tau tentang PKH.

B: Karena kan kita Program dari pusat ya, rata rata yang di kelurahan itu kan apa namanya teman teman dari dinas sosial yakan juga tau nya bantuan dari DKI

B: Kita bertemu langsung, kalo koordinasi kita bertemu langsung.

B: bisa saja kalau kita sudah akrab sama RT/RW nya, alhamdulillah si di jagakarsa kita udah akrab sama RT/RW nya

B: karena kan tadi untuk rekonsiliasi itu kita harus memastiin apa si KPM udah melakukan pencarian terkait bantuannya apa belum, itu kan kadang kita gabisa langsung kerumahnya KPM, di jagakarsa itu KPM nya terbanyak, se kecamatan di Jakarta Selatan.

A: Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Program Keluarga Harapan? Salah satu nya dengan P2K2 ya?

B: Iya betul, lebih ke arah pemahaman aja si, bahwa bantuan itu ga selamanya ada, dan mereka itu harusnya bersikap mandiri, ya tapi kan balik lagi untuk kesadarannya masing-masing orang, untuk menyadarkannya juga sulit, lebih arah sebagai mentornya aja untuk ke arah sana, untuk memastikan mandiri dan sebagainya ya kita gabisa untuk memastikannya.

A: Bagaimana rencana tindakan yang di gunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari Program Keluarga Harapan?

B: melakukan P2K2 dan memberikan edukasi dan sosialisai untuk KPM

A: Apakah di kecamatan Jagakarsa ada KPM yang mengalami kesulitan untuk melakukan pencairan dana? Jika ada, apa solusinya? Apakah ada kendala terkait penyaluran bantuan PKH? (dari bank/PT. Pos)

B: Kalo belum paham biasanya KPM nya sudah lansia di atas 70 tahun atau nenek-nenek, jadi kita memberikan pemahaman kepada keluarga nya. Kalau kartu rusak atau hilang kalo di jagakarsa itu harus ada rekomendasi dulu dari pendamping, nanti ada surat rekomendasi dari pendamping, dan pendamping juga ikut mendampingi.

B: Mendampingi KPM selama sebulan bervariasi, tergantung aduannya aja si, karena ada tindak lanjut belum pencarian dan ada yang terblokir dan hilang, mau gamau kita bantu ke bank, kemarin si saya ada, 2 warga, minggu ini ada 2 warga, engga ngitung berapa nya ada aduan saya urus ada aduan saya urus.

B: hm Untuk sekarang masih baru ya? Untuk masalah wilayah mana yang menggunakan PT.pos atau bank, ya semua nya. Kenapa ada 2? Karena yang pertama yang udah punya kartu ATM PKH maka bantuannya masuk kesitu nah kenapa lewat PT.Pos ada beberapa KPM baru terindikasi belum punya ATM PKH / KKS (kartu kesejahteraan Sosial) makanya lewat PT pos itu, gitu.

A: Apakah ada keluhannya terkait perbedaannya?

B: kalo dari bank kan uang nya langsung masuk ke rekening kapan aja dia mau ngambil pulang kerja dia mau ngambil juga bisa, paling kendala nya itu, kalo hilang atau terblokir, minta surat dulu sama kita, suratnya pun harus stampel basah, kadang yang bikin lama kita harus minta tanda tangan ke korkot, Tapi kalo PT. Pos tuh, hm Kadang waktunya di jadwal kan, tanggal sekian jam sekian, jadi kadang dia kendala kerja, kendala apa, nanti kalo nyusul harus ngambil sendiri ke kantor pos fatmawati gitu, kalo PT.Pos itu melalui undangan, undangannya disesuaikan denga alamat di KTP, banyak KPM yang terkendala belum mendapat undangan karena alamatnya yang pindah pindah. Kalau tidak tau dapat surat kan jadi gatau kalo mendapatkan bantuan. Terus juga kalo pengalaman kemarin, penyaluran melalui PT. Pos sampai sehabian, itu banyak yang pingsan, kaya lansia-lansia, karena ngantri lama, meskipun sudah dibagi untuk RW sekian jam sekian tapi dilapangannya berbeda

A: Apakah alokasi anggaran PKH sudah tepat sasaran? Dan Apakah KPM PKH di kecamatan Jagakarsa sudah benar-benar menerimanya dan sesuai komponennya?

B: Masih kurang optimal, karena masih terdapat temuan-temuan dilapangan terkait ketepatan sasaran, terkadang masih ada yang tidak sesuai komponennya, tapi sekarang sudah mulai membaik karena sedang di perbaiki oleh teman teman pendamping lainnya juga

B: kemarin balita engga masuk ya?

B: iya engga karena terkendala di SIKS jadi engga masuk yang kemarin zoom meeting.

A: Apakah ada anggaran dalam menjalankan PKH di kecamatan Jagakarsa?

B: Honor pokok kita ya ada

B: mungkin di daerah daerah ada yang dapet, nama nya honor daerah, setiap bulan 250ribu tapi diambil 2 bulan jadi 500ribu, begitu datang kesini engga dapet

A: Apakah penggunaan alokasi anggaran PKH oleh KPM sudah sesuai aturan?

B: kalo untuk mengarahkan kita sudah mengarahkan sesuai ketentuan, cuman secara pasti nya kami engga tau, kalo mereka mah iya iya aja

B: Tapi ini kok rata-rata emang buat kebutuhan, kalo engga untuk belanja ya untuk sekolah, ya memang untuk itu kan tujuannya. Kebutuhan sekolah.

B: Malah ada yang laporan pas banget ini pak saya butuh biaya buat beli baju anak sekolah

A: Apakah para pendamping melakukan edukasi dan sosialisasi terkait bantuan yang diterima?

B: iya melakukannya, seperti, untuk apa ini bantuannya diperuntukannya jangan dibuat beli ini beli itu maksudnya hal hal yang negatif, jangan buat beli rokok atau hal-hal yang engga bermanfaat, itu edukasi dan sosialisasi yang kita lakukan, itu dilakukan pas lagi P2K2.

A: Untuk pelatihan atau peningkatan SDM PKH di Kecamatan Jagakarsa bagaimana?

B: Diklat pertama itu Orientasi untuk pendamping-pendamping yang baru masuk, terus ada diklat FDS/TKS dan kita di terjunkan di suatu wilayah yakan terus kita dikasih materi, lalu kita implementasikan kepada warga sekitar, terus terakhir ada diklat stunting, diklat ini sesuai arahan kemensos.

B: Paling ada namanya laporan bulanan, biasanya setiap bulan seluruh SDM PKH di Jakarta Selatan berkumpul dan ada Koordinator Kota Jakarta Selatan, ada Koordinator Wilayah DKI, dan ada dari SUDIN Jakarta Selatan.

A: Apakah di Kecamatan Jagakarsa ada KPM yang bekerja sama dengan Pemerintah ataupun Non-Pemerintah?

B: Dulu ada 1 KPM bekerja sama dengan jakpreneur, di bidang tahu gejrot, kalo ada kegiatan JakPreneur diajak, udah gitu aja.

A: Ada KPM yang dimudahkan dengan adanya kerja sama di bidang pendidikan?

B: KPM mendapatkan kemudahan karena adanya kerja sama dengan universitas moestopo 5 orang baru tahap pengajuan

B: sebelumnya juga ada di UICI (Universitas Insan Cita Indoensia) 2 orang.

B: untuk masuk sekolah karena banyak jalurnya, salah satu nya kalo punya PKH ya jadi bisa ikut jalur nya. Nama jalurnya jalur afirmasi.

B: Mempermudah masuknya dan tambahan biaya sekolah anaknya maksudnya

I. Lampiran 9. 1 Transkrip Wawancara VII

Informan Penelitian	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Jagakarsa Ibu Siti Wahyuni
Hari/Tanggal	Jumaat, 8 Agustus 2023

A: Peneliti

B: Informan

A: Bagaimana informasi yang disampaikan pendamping terkait informasi/kebijakan baru? Apakah mudah dimengerti?

B: Mudah dimengerti

A: Bagaimana informasi yang diberikan pendamping untuk di infokannya?

B: Informasi yang diberikan pendamping, di share ke grup dari ketua kelompok

A: Apakah setiap KPM PKH memiliki grup wa untuk mempermudah penyebaran informasi dan koordinasi?

B: Ya ada

A: Jika Ibu mengalami kendala, apa yang ibu lakukan?

B: kalo masalah bantuan tidak terkendala

A: Apakah ibu pernah melihat ada nya KPM yang sudah mapan?

B: Tidak

A: Apakah Ibu mengalami kesulitan untuk melakukan pencairan dana bantuan sosial PKH?

B: Engga

A: Apakah Ibu menggunakan dana bantuan sosia PKHl sesuai aturan?

B: Iya

A: Apakah Ibu mendapat dana bantuan sosial, sesuai komponennya?

B: Iya

A: Apakah para pendamping melakukan edukasi dan sosialisasi terkait bantuan yang diterima?

B: iya

A: Apakah Ibu mendapatkan kemudahan untuk mengakses pendidikan dan Kesehatan?

B: Iya

J. Lampiran 10. 1 Transkrip Wawancara VIII

Informan Penelitian	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Jagakarsa
	Ibu Mashuroh
Hari/Tanggal	Jumaat, 8 Agustus 2023

A: Peneliti

B: Informan

A: Bagaimana informasi yang disampaikan pendamping terkait informasi/kebijakan baru? Apakah mudah dimengerti?

B: Mudah

A: Bagaimana informasi yang diberikan pendamping untuk di infokannya?

B: dari wa atau langsung

A: Apakah setiap KPM PKH memiliki grup wa untuk mempermudah penyebaran informasi dan koordinasi?

B: ada

A: Jika Ibu mengalami kendala, apa yang ibu lakukan?

B: Meminta tolong kepada pendamping

A: Apakah ibu pernah melihat ada nya KPM yang sudah mapan?

B: Tidak

A: Apakah Ibu mengalami kesulitan untuk melakukan pencairan dana bantuan sosial PKH?

B: Engga

A: Apakah Ibu menggunakan dana bantuan sosia PKHl sesuai aturan?

B: Iya

A: Apakah Ibu mendapat dana bantuan sosial, sesuai komponennya?

B: Iya

A: Apakah para pendamping melakukan edukasi dan sosialisasi terkait bantuan yang diterima?

B: iya

A: Apakah Ibu mendapatkan kemudahan untuk mengakses pendidikan dan Kesehatan?

B: Iya



DOKUMENTASI



Dokumentasi 1 Wawancara dengan Pendamping Program keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Jagakarsa.

- 1. Pak Wahyu Ramadhan**
- 2. Ibu Savitri Nissa Devi**
- 3. Ibu Nievika brsembiring**

Rabu, 26 Juli 2023 di Tetta Kopi Jagakarsa



Dokumentasi 2 Wawancara dengan Bu Shely Widyanti selaku Informan Kepala Satuan Pelaksana Sosial di Kecamatan Jagakarsa.

Rabu, 26 Juli 2023 di Kantor Kecamatan Jagakarsa



**Dokumentasi 3 Wawancara dengan Pak Ihsan Latif selaku Informan Koordinator Kecamatan di Kecamatan Jagakarsa.
Rabu, 12 Juli 2023 di Setu Babakan Jakarta Selatan**



Dokumentasi 4 Wawancara dengan Pak Mamay Sumarna selaku Informan Koordinator Kota Jakarta Selatan dan Pak Beni selaku pendamping di Kecamatan Jagakarsa.

Rabu, 03 Juli 2023 di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan



Dokumentasi 5 Wawancara dengan Pak Andi Mawardi selaku Informan Koordinator Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Rabu, 13 Juli 2023 di Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta



Dokumentasi 6 Wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Jagakarsa.

- 1. Ibu Dana**
- 2. Ibu Erin**
- 3. Ibu Sani**

Selasa, 25 Juli 2023 Rumah KPM Kecamatan Jagakarsa



Dokumentasi 7 Wawancara dengan Ibu Siti Wahyuni selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Jagakarsa.

Jumaat, 8 Agustus 2023 Rumah KPM Kecamatan Jagakarsa.



Dokumentasi 8 Wawancara dengan Ibu Mashuroh selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Jagakarsa.

Jumaat, 8 Agustus 2023 Rumah KPM Kecamatan Jagakarsa.

BAB 1 - BAB 5.docx

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

20%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

12%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.upbatam.ac.id Internet Source	5%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
4	stia-binataruna.e-journal.id Internet Source	1%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
6	ojs-al-iddara-balad.web.id Internet Source	1%
7	ejournal.unisbablitar.ac.id Internet Source	1%
8	123dok.com Internet Source	1%
9	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%

UNIVERSITAS NASIONAL

Hasil Turnitin